



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 7/DPR RI/II/2016-2017

**TENTANG
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PRIORITAS TAHUN 2017 DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PERUBAHAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 65 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1362) *juncto* Pasal 40 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2017 dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019;
 - b. bahwa Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015;
 - c. bahwa Keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 2016 telah menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2017 dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 untuk ditetapkan;

Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 untuk ditetapkan;

- d. Penetapan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2017 dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1362);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-15 tanggal 15 Desember 2016;

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2017 DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PERUBAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019.**

PERTAMA

: Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2017 dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan XI DPR RI;
6. Ketua-Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Ketua FPDI Perjuangan, Ketua FPG, Ketua FPD, Ketua FPKS, Ketua FPAN, Ketua FPPP, Ketua FPKB, Ketua F-GERINDRA, Ketua FPN Demokrat dan Ketua F-HANURA;
8. Kepala Badan Keahlian DPR RI;
9. Para Deputi dan Inspektorat Utama di lingkungan Setjen DPR RI;
10. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 15 Desember 2016

K E T U A,


Drs. SETYA NOVANTO, Ak.^h

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2017**

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH
1.	RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan.	PEMERINTAH
2.	RUU tentang Pertanahan.	DPR
3.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	PEMERINTAH
4.	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.	DPR
5.	RUU tentang Arsitek.	DPR
6.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional.	DPR
7.	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR
8.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).	DPR
9.	RUU tentang Sistem Perbukuan.	DPR
10.	RUU tentang Kebudayaan.	DPR
11.	RUU tentang Ekonomi Kreatif.	DPD
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	PEMERINTAH
13.	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	PEMERINTAH

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH
14.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR
15.	RUU tentang Wawasan Nusantara.	DPD
16.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.	PEMERINTAH
17.	RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum).	PEMERINTAH
18.	RUU tentang Kepalangmerahan.	PEMERINTAH
19.	RUU tentang Jabatan Hakim.	DPR
20.	RUU tentang Pertembakauan.	DPR
21.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	DPR
22.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR
23.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR
24.	RUU tentang Perkelapasawitan.	DPR
25.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR
26.	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia.	DPR
27.	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas tertulis RUU tentang Perubahan	DPR


No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH
	atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).	
28.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	DPR
29.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	DPR
30.	RUU tentang Kebidanan.	DPR
31.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	DPR
32.	RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.	DPR
33.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	DPR
34.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.	DPR
35.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	PEMERINTAH
36.	RUU tentang Bea Meterai.	PEMERINTAH
37.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	PEMERINTAH
38.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).	PEMERINTAH
39.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	PEMERINTAH

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH
40.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.	DPR
41.	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	DPR
42.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR
43.	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.	DPR
44.	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat.	DPR
45.	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah).	PEMERINTAH
46.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.	PEMERINTAH
47.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal	PEMERINTAH
48.	RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan.	DPD
49.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	DPR

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.
2.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
5.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

K E T U A,



Drs. BETYA NOVANTO, Ak.

**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PERUBAHAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019**

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU & NA DISIAPKAN OLEH
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	DPR/PEMERINTAH
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.	DPR/PEMERINTAH
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).	DPR/PEMERINTAH
4	RUU tentang Persandian.	DPR/PEMERINTAH
5	RUU tentang Rahasia Negara.	DPR/PEMERINTAH
6	RUU tentang Keamanan Nasional.	DPR/PEMERINTAH
7	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR/PEMERINTAH
8	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia.	DPR/PEMERINTAH
9	RUU tentang Konvergensi Telematika.	DPR/PEMERINTAH/DPD
10	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara.	PEMERINTAH
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.	PEMERINTAH

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU & NA DISIAPKAN OLEH
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.	DPR
13	RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi.	PEMERINTAH
14	RUU tentang Wawasan Nusantara.	DPD
15	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.	PEMERINTAH
16	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	DPR/DPD
17	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.	PEMERINTAH
18	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	DPR
19	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	DPR
20	RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.	DPR/PEMERINTAH
21	RUU tentang Pertanahan.	DPR
22	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD.	DPR/PEMERINTAH/DPD

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU & NA DISIAPKAN OLEH
23	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.	DPR/PEMERINTAH/DPD
24	RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.	DPR/DPD
25	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.	DPR/PEMERINTAH
26	RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.	DPD
27	RUU tentang Provinsi Bali.	DPD
28	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan.	DPR
29	RUU tentang Partisipasi Masyarakat.	DPD
30	RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan.	DPD
31	RUU Sistem Penyelesaian Konflik Agraria.	DPR
32	RUU tentang Perkumpulan.	DPR/PEMERINTAH/DPD
33	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	PEMERINTAH
34	RUU tentang Hukum Acara Pidana.	DPR
35	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.	DPR/PEMERINTAH

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU & NA DISIAPKAN OLEH
36	RUU tentang Perubahan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.	PEMERINTAH/DPD
37	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	DPR/PEMERINTAH
38	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	PEMERINTAH/DPD
39	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.	DPR/PEMERINTAH
40	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	DPR
41	RUU tentang Hukum Acara Perdata.	PEMERINTAH
42	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat.	DPR/DPD
43	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.	DPR/PEMERINTAH
44	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.	PEMERINTAH
45	RUU tentang Mahkamah Agung.	DPR
46	RUU tentang Merek.	PEMERINTAH
47	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.	PEMERINTAH
48	RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi).	PEMERINTAH
49	RUU tentang Paten.	PEMERINTAH

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU & NA DISIAPKAN OLEH
50	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.	PEMERINTAH
51	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	DPR
52	RUU tentang Jabatan Hakim.	DPR
53	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.	PEMERINTAH
54	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	PEMERINTAH
55	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara.	PEMERINTAH
56	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.	PEMERINTAH
57	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.	PEMERINTAH
58	RUU tentang Balai Harta Peninggalan.	PEMERINTAH
59	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.	DPR
60	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	DPR
61	RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (<i>Contempt of Court</i>).	DPR

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU & NA DISIAPKAN OLEH
62	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.	DPR
63	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	DPR
64	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.	DPR/PEMERINTAH/DPD
65	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR/PEMERINTAH
66	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	DPR/DPD
67	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.	DPR/PEMERINTAH
68	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	DPR/PEMERINTAH
69	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.	DPR
70	RUU tentang Zona Tambahan Indonesia.	PEMERINTAH
71	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.	DPR/DPD
72	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	DPR/PEMERINTAH

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU & NA DISIAPKAN OLEH
73	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.	DPR/DPD
74	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.	DPR
75	RUU tentang Kedaulatan Pangan.	DPR
76	RUU tentang Jalan.	DPR/DPD
77	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.	DPR
78	RUU tentang Jasa Konstruksi.	DPR
79	RUU tentang Arsitek.	DPR
80	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional.	DPR
81	RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan.	DPR
82	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.	DPR
83	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.	DPR/PEMERINTAH
84	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	DPR/DPD
85	RUU tentang Perkoperasian.	DPR/PEMERINTAH/DPD
86	RUU tentang Pertembakauan.	DPR

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU & NA DISIAPKAN OLEH
87	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	DPR
88	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR
89	RUU tentang Bahan Kimia.	PEMERINTAH
90	RUU tentang Metrologi Legal.	PEMERINTAH
91	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah.	DPD
92	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	PEMERINTAH
93	RUU tentang Ekonomi Kreatif.	DPD
94	RUU tentang Kewirausahaan Nasional.	DPR
95	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	DPR/PEMERINTAH
96	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	DPR/PEMERINTAH
97	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan.	DPR/PEMERINTAH
98	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.	DPR

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU & NA DISIAPKAN OLEH
99	RUU tentang Geologi.	DPR/DPD
100	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi.	DPR
101	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	DPR
102	RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender.	DPR/PEMERINTAH/DPD
103	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	DPR
104	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR
105	RUU tentang Penyandang Disabilitas.	DPR
106	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	DPR/DPD
107	RUU tentang Kepalaangmerahan.	DPR
108	RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial.	DPR
109	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan.	DPR
110	RUU tentang Ketahanan Keluarga.	DPR
111	RUU tentang Perlindungan Umat Beragama.	DPR/PEMERINTAH

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU & NA DISIAPKAN OLEH
112	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	PEMERINTAH
113	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.	DPR
114	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.	DPR
115	RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.	DPR/DPD
116	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	DPR
117	RUU tentang Kebidanan.	DPR/DPD
118	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.	PEMERINTAH
119	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.	DPR
120	RUU tentang Praktik Kefarmasian.	DPR
121	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.	DPR
122	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.	PEMERINTAH

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU & NA DISIAPKAN OLEH
123	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	PEMERINTAH
124	RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.	DPR/PEMERINTAH
125	RUU tentang Sistem Pengupahan.	DPR/PEMERINTAH
126	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	DPR/PEMERINTAH/DPD
127	RUU tentang Kebudayaan.	DPR
128	RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah.	DPD
129	RUU tentang Sistem Perbukuan.	DPR
130	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.	DPR/DPD
131	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.	DPR
132	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.	DPR/PEMERINTAH/DPD
133	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.	DPR/PEMERINTAH
134	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.	DPR/PEMERINTAH

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU & NA DISIAPKAN OLEH
135	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	DPR/PEMERINTAH
136	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah.	DPR/PEMERINTAH
137	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.	PEMERINTAH
138	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	DPR/DPD
139	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	DPR
140	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal.	PEMERINTAH
141	RUU tentang Pajak Penghasilan.	PEMERINTAH/DPD
142	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	PEMERINTAH/DPD
143	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara.	PEMERINTAH/DPD
144	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan sistem Nilai Tukar.	DPR
145	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.	PEMERINTAH
146	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.	PEMERINTAH
147	RUU tentang Lelang.	PEMERINTAH
148	RUU tentang Penjaminan.	DPR

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU & NA DISIAPKAN OLEH
149	RUU tentang Penjaminan Polis.	PEMERINTAH
150	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.	PEMERINTAH
151	RUU tentang Penilai.	PEMERINTAH
152	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa.	DPD
153	RUU tentang Perekonomian Nasional.	DPR/DPD
154	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	PEMERINTAH
155	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia.	PEMERINTAH
156	RUU tentang Bea Materai.	PEMERINTAH
157	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan.	PEMERINTAH
158	RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.	PEMERINTAH
159	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.	DPR
160	RUU tentang Tabungan Haji.	DPR
161	RUU tentang Pengampunan pajak.	PEMERINTAH
162	RUU tentang Perkelapasawitan.	DPR
163	RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU tentang Pertekstilan.	DPR

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU & NA DISIAPKAN OLEH
164	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	PEMERINTAH
165	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	PEMERINTAH
166	RUU tentang Keamanan Laut.	DPR
167	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR
168	RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.	DPR
169	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR
170	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR
171	RUU Tentang Konsultan Pajak.	DPR
172	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR
173	RUU tentang Ketenaganukliran.	PEMERINTAH
174	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	PEMERINTAH
175	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.	DPD

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU & NA DISIAPKAN OLEH
176	RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.	DPD
177	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	DPR
178	RUU tentang Sanitasi.	DPR
179	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	DPR
180	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPR
181	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	DPR
182	RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.	DPR

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

K E T U A,



Drs. SETYA NOVANTO, Ak.